

EFEKTIVITAS PKH BIDANG PENDIDIKAN DALAM PARTISIPASI PENDIDIKAN ANAK KPM DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0

**Septian Dwi Pangestu¹,
Muhammad Fedryansyah²**
^{1,2} Prodi Kesejahteraan Sosial
FISIP Universitas Padjadjaran,

Article history

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

*Corresponding author

Email :¹septian19003@mail.unpad.ac.id,

²m.fedryansyah@unpad.ac.id

No. doi: doi: 10.24198/focus.v5i2.39232

ABSTRAK

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan jaminan secara sosial dari negara. Hal ini untuk menjamin keberfungsian sosial baik individu maupun kelompok agar kesejahteraan sosial masyarakat dapat tercapai. Perlindungan jaminan sosial di Indonesia dinaungi oleh Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan adalah salah satu perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah dalam hal ini di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Bantuan PKH menysasar keluarga pra sejahtera yang dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan PKH adalah memberikan pelayanan jaminan sosial terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan di lingkungan sekitar mereka agar nilai-nilai kesejahteraan sosial mereka dapat terjamin. Dalam penelitian ini fokus kajian adalah melihat efektivitas PKH dalam bidang pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak KPM di era Industri 4.0 dan Society 5.0. Pendidikan memudahkan akses terhadap informasi dan pengetahuan sehingga kualitas SDM masyarakat KPM dapat meningkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan PKH dalam bidang pendidikan sudah efektif dalam meningkatkan partisipasi anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Hal dilihat dari keberhasilan PKH dalam meningkatkan partisipasi dan bahkan prestasi dari anak-anak dari golongan Rumah Tangga Sangat Miskin di berbagai wilayah di Indonesia.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Partisipasi Pendidikan

ABSTRACT

Every citizen has the right to receive protection and social security from the state. This is to ensure the social functioning of both individuals and groups so that the social welfare of the community can be achieved. Social security protection in Indonesia is covered by the Ministry of Social Affairs. The Family Hope Program is one of the protections and social security provided by the government in this case under the responsibility

of the Ministry of Social Affairs. PKH assistance targets underprivileged families who are categorized as Beneficiary Families (KPM). The purpose of PKH is to provide social security services to Very Poor Households (RTSM) to access health and education facilities in their surroundings so that their social welfare values can be guaranteed. In this study, the focus of the study was to see the effectiveness of PKH in the field of education in increasing the education participation of KPM children in the Industrial 4.0 and Society 5.0 era. Education facilitates access to information and knowledge so that the quality of human resources for the KPM community can improve. The method used in this research is literature study. The results of this study indicate that the implementation of PKH in the education sector has been effective in increasing the participation of Beneficiary Families (KPM) children in the era of the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. This can be seen from the success of PKH in increasing participation and even the achievements of children from the Very Poor Household group in various regions in Indonesia.

Keywords: *Family Hope Program, Education Participation*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pelaksanaan penjaminan terciptanya kesejahteraan sosial di masyarakat adalah melalui pemberian Bantuan Sosial di bawah naungan Kementerian Sosial. Penerapan kebijakan sosial tersebut salah satunya dengan mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah salah satu perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah dalam hal ini di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Bantuan PKH menasar keluarga pra sejahtera yang dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bentuk bantuan sosial secara langsung secara internasional dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT). Tujuan utama dari pelaksanaan CCT adalah menekan angka kemiskinan yang terjadi pada suatu negara dan cara ini telah terbukti efektif dalam menekan angka

kemiskinan di berbagai negara (Kemensos, 2022).

Tujuan PKH adalah memberikan pelayanan jaminan sosial terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan di lingkungan sekitar mereka agar nilai-nilai kesejahteraan sosial mereka dapat terjamin. Hal ini diharapkan dapat memberdayakan dan memperkuat KPM sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan (Muntari, 2019). PKH memberikan bantuan bersyarat dengan kategori ibu hamil, anak 0-6 tahun, anak sekolah, disabilitas berat dan lansia. Komponen tersebut menjadi tolak ukur bagi besarnya pemberian dana bantuan kepada KPM. Hingga tahun 2020 penerima PKH telah menyentuh angka lebih dari 10 juta KPM di seluruh Indonesia (Kemensos, 2022).

Penelitian ini akan fokus dalam mengkaji PKH dalam bidang pendidikan. Bantuan terhadap anak KPM dalam PKH mencakup bantuan dalam hal pendanaan yang digunakan untuk menunjang sekolah anak dengan rentang sekolah dasar (SD/Sederajat) hingga sekolah menengah atas (SMA/SMK/Sederajat). Dukungan pendidikan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup anak KPM sehingga dapat terbebas dari kemiskinan yang bersifat struktural (Bakulu et al, 2021). Pelaksanaan PKH juga dibantu oleh pendamping bagi setiap kelompok keluarga binaan PKH. Hal ini untuk mempermudah fungsi manajerial, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PKH agar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Pentingnya pendidikan terkait dengan masuknya peradaban manusia saat ini pada era industri 4.0 dan juga society 5.0 yang jelas menuntut penyesuaian dan keterampilan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Revolusi industri 4.0 mengubah peran artificial intelligence sebagai kemampuan utama yang menjadi fokus pengembangan pekerjaan saat ini. Manusia saat ini telah masuk pada otomatisasi pencatatan pada semua bidang serta melahirkan banyak bidang pekerjaan baru (Ghufron, 2018). Dampak interaksi sosial juga turut berubah menyesuaikan dengan dinamika kehidupan saat ini. Pola sosialisasi telah berubah menuju mudahnya pengaksesan terhadap informasi secara digital yang dikenal society 5.0 (Decky, 2019). Kaitannya dengan bidang pendidikan PKH adalah dengan akses terhadap pendidikan yang mumpuni diharapkan bahwa anak dari KPM PKH akan mendapatkan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan arus perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Sehingga dapat

menghasilkan SDM yang unggul dan kompeten.

Pendidikan memudahkan akses terhadap informasi dan pengetahuan sehingga kualitas SDM masyarakat KPM dapat meningkat. Penerapan bentuk program CCT/PKH di Indonesia menunjukkan hasil yang positif bagi berkurangnya angka pekerja anak dan partisipasi pendidikan anak sekolah (Kusumaningrum, 2020). Tujuan akhir dari PKH dalam bidang pendidikan adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan partisipasi tingkat sekolah bagi anak KPM pada jenjang SD, SMP, hingga SMA dan dapat memenuhi kriteria kehadiran minimal 85% selama tahun ajaran tersebut (Astari, 2018). Dalam pelaksanaan PKH di lapangan banyak hal yang menjadi kendala ataupun hambatan bagi efektivitas pelaksanaan PKH. Seperti permasalahan verifikasi pendataan peserta KPM yang sering bermasalah antara pihak *eligible* dan *non eligible*. Atau dalam kasus juga dijumpai belum maksimalnya lembaga pendukung seperti puskesmas dan sekolah untuk dapat memverifikasi keabsahan peserta PKH (Sasmito & Nawangsari, 2019). Selain itu banyak dijumpai penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan di luar bidang pendidikan anak. Adapun munculnya kasus anak yang putus sekolah karena berbagai faktor seperti belum adanya konstruksi sosial tentang pentingnya pendidikan anak dari orang tua RTSM penerima PKH. Penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana efektivitas PKH dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak KPM ditengah perubahan era menuju industri 4.0 dan society 5.0.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka,

yang disertakan dengan studi literatur dari berbagai artikel jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Studi literatur merupakan pencarian teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Tim penulis menggunakan studi literatur non-teknikal, yakni pencarian sumber berdasarkan tidak hanya pada laporan, karya ilmiah teoritis, serta berbagai informasi yang profesional dengan menggunakan penulisan ilmiah, namun juga sumber-sumber lainnya seperti laporan dan berita untuk mencari berbagai sumber (Corbin & Strauss, 2015). Referensi dapat dicari dari jurnal, buku, artikel laporan penelitian, dan situs *internet* yang mumpuni seperti Google Scholar. Hasil dari studi literatur adalah terkoneksi referensi yang relevan dengan perumusan masalah, dan diharapkan dari pengumpulan berbagai studi literatur dapat mengetahui korelasi dari berbagai pengumpulan referensi dengan topik yang dibahas dan menghasilkan sebuah pengetahuan yang relevan dan berguna untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik yang serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH)

Penerapan kebijakan pelaksanaan PKH di Indonesia berawal dari tahun 2007 yang mengimplementasi kebijakan *Conditional Cash Transfer* (CCT) secara internasional. PKH diharapkan mampu menjadi program efektif yang mampu memberikan jaminan dan perlindungan sosial terhadap masyarakat dengan golongan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Indonesia. Hal ini dilakukan merujuk pada upaya pembangunan sosial di Indonesia saat itu memiliki hambatan besar dengan masalah kemiskinan yang terjadi. Perencanaan pembangunan negara harus dapat berjalan dengan memperhatikan berbagai proses

multidimensi yang menyangkut banyak faktor, seperti struktur sosial, ekonomi, kualitas SDM, kesenjangan hingga kemiskinan absolut (Nurwan & Hasan, 2020). Optimalisasi kebijakan PKH dalam membantu mengentaskan masalah kemiskinan telah teruji di negara-negara Amerika Latin seperti Kolombia, Honduras, Brasil, Nikaragua. Selain itu program berbentuk CCT dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dan peningkatan partisipasi pendidikan pada anak (Zavakou, 2011).

PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 70 tahun. Berikut adalah kategori indeks dan faktor penimbang Bantuan Sosial PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021):

Tabel 1. Jenis Komponen dan Besaran Bantuan PKH Per Tahun (2021)

Jenis Komponen	Besaran Bantuan RP/Tahun
Kategori Ibu Hamil/Nifas	Rp 3.000.000,-
Kategori Anak 0-6 tahun	Rp 3.000.000,-
Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp 900.000,-
Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp 1.500.000,-
Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp 2.000.000,-
Kategori Penyandang Disabilitas Berat	Rp 2.400.000,-
Kategori Lanjut Usia	Rp 2.400.000,-

Sumber : Website PKH Kemensos RI 2022

Sebagai sebuah program yang bertujuan untuk mengentaskan secara sistematis, PKH tidak hanya berfokus pada pemberian dana tanpa pengawasan penggunaan uang bantuan secara jelas dan tepat sasaran. Untuk mendukung tercapainya tujuan dan pengawasan yang optimal PKH memiliki pendamping yang bertugas dalam melakukan monitoring dan pendampingan bagi setiap keluarga penerima manfaat. Selain itu terdapat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2KP) atau dikenal dengan istilah *Family Development Session*. KPM akan dikelompokkan untuk melakukan pertemuan secara berkala dengan pendamping yang sekaligus berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan PKH di setiap Kecamatan (Nurwan & Hasan, 2020).

Fokus utama dari PKH tidak hanya dalam pengentasan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi KPM dengan pemberian dana secara langsung seperti bentuk Bantuan Langsung Tunai. PKH mewujudkan tindakan bagi rumah tangga sangat miskin untuk dapat berdaya sehingga jaring kemiskinan yang selama ini bersifat struktural dapat diselesaikan. Kontribusi PKH dapat dikategorikan dalam 3 fase yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang menurut penelitian oleh Sunit & Siti (2019). Secara

jangka pendek bantuan PKH bersifat untuk meringankan beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sehingga

diharapkan pendapatan utama KPM dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Jangka menengah program PKH adalah dengan pemenuhan gizi, kesehatan, pendidikan dapat menjamin keberfungsian sosial KPM sehingga menciptakan sumber daya manusia dan kehidupan yang lebih berkualitas. Secara jangka panjang pelaksanaan PKH diharapkan mampu untuk dapat memutus rantai kemiskinan yang biasanya terjadi antar generasi keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui perubahan peningkatan pola pikir, perilaku kemandirian, kesehatan sehingga tercipta masyarakat yang terpenuhi kesejahteraan sosialnya.

Era Industri 4.0 dan Society 5.0

Saat ini dunia secara global menyepakati bahwa kita telah masuk pada era industri 4.0 dan juga society 5.0. Pendidikan menjadi elemen penting yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan bagi penilaian suatu bangsa. Bergesernya pola pendidikan mengembangkan proses transfer ilmu yang terjadi mungkin menjadi semakin mudah. Penggunaan internet saat ini memiliki peran penting dalam sektor pendidikan khususnya dalam memberikan transfer ilmu terhadap anak. Tetapi dalam pengoperasiannya peran pendidikan secara konvensional tidak dapat tergantikan. Hal ini karena dalam proses pembelajaran penerapan ilmu *softskill* dan juga *hardskill* tidak bisa semudah di transfer

menggunakan internet semata (Risdianto, 2019). Realita yang terjadi di Indonesia adalah proses pendidikan masih mengalami kesenjangan yang cukup nyata. Artinya Indonesia mungkin tidak sepenuhnya tertinggal secara pendidikan, tetapi pembangunan sosial ekonomi yang belum merata mengakibatkan ketimpangan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Satu contoh nyata dalam ketimpangan dan belum meratanya pembangunan adalah kesenjangan sarana dan prasarana komunikasi antar daerah di Indonesia (Nastiti & Abdu, 2020). Hal ini juga menjadi kendala dalam implementasi bidang pendidikan dalam PKH. Masyarakat di Ibu Kota Jakarta penerima PKH mungkin akan terasa mudah dalam mengakses pendidikan dan mendapatkan layanan informasi untuk mendukung kemajuan sumber daya manusia disana. Sedangkan ketimpangan dapat terjadi pada masyarakat daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, Terdepan) yang sama-sama menjadi keluarga penerima manfaat PKH. Tidak semua akses dapat dijangkau bahkan untuk mendapat sinyal bagi komunikasi mendasar saja.

Pelaksanaan PKH Bidang Pendidikan

Keterkaitan PKH bidang pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak di era saat ini secara teoritis akan menunjukkan hasil yang positif. Dimana pemerintah merancang kebijakan sosial dalam bentuk PKH yang mampu untuk menstimulasi kehadiran anak di sekolah-sekolah untuk dapat meningkatkan kualitas diri dan keluarga mereka di masa yang akan mendatang. Merujuk dari data Kementerian Sosial (2021) capaian perkembangan partisipasi pendidikan anak KPM PKH mengalami peningkatan baik secara pendidikan wajib 12 tahun maupun melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Capaian menuju jenjang

pendidikan tinggi semakin menambah upaya peningkatan kualitas sumber daya dari para Keluarga Penerima Manfaat.

Kegiatan PKH bidang pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada pengawasan penggunaan dana pendidikan semata, tetapi dengan kerjasama pendamping dan sekolah saat ini anak KPM PKH juga diberikan bimbingan untuk dapat berkuliah melalui program Gerakan Ayo Kuliah (GAK). Hal tentu menjadi sebuah kemajuan bagi pelaksanaan program sesuai dengan tujuan awal PKH yaitu untuk dapat mensejahterakan KPM melalui pendidikan yang dapat memperbaiki pola pikir anak dan mengentaskan masalah kemiskinan yang terjadi. Kemiskinan banyak terjadi karena faktor lingkungan yang terus dari generasi ke generasi berikutnya apabila tidak dilakukan upaya perbaikan pada kualitas sumber daya manusianya. Hal ini telah terjadi seperti berita dari Kemensos RI (2022) bahwa pada SNMPTN 2022 Gerakan Ayo Kuliah di Provinsi Lampung berhasil membantu 41 siswa/i Sekolah Menengah Atas/Sederajat lolos dalam seleksi SNMPTN di berbagai perguruan tinggi tanah air. Selain daripada itu pendamping PKH juga turut membantu dalam sinkronisasi bantuan pendidikan melalui KIP Kuliah yang berguna dalam membantu pendanaan mahasiswa untuk dapat berkuliah. Tentu memasuki perguruan tinggi memerlukan persiapan biaya yang matang dan sering kali kendala biaya menjadi penghambat bagi Keluarga Miskin untuk anaknya dapat melanjutkan berkuliah. Melalui sinkronisasi program PKH dan KIP Kuliah hal ini diharapkan mampu meringankan beban pendidikan pada perguruan tinggi sehingga anak KPM dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Studi yang dilakukan oleh Bryan (2021) tentang efektivitas PKH bidang pendidikan di Halmahera Timur menunjukkan bahwa PKH sangat membantu keluarga penerima manfaat dalam proses pendidikan anak. Bantuan kepada setiap anak yang bersekolah memudahkan peran orang tua untuk dapat mengatur pendapatan yang mereka dapat untuk keperluan primer lainnya. Sehingga bantuan PKH dalam bidang pendidikan dinilai dapat mengoptimalkan proses pendidikan terhadap anak-anak mereka. Penelitian efektivitas PKH juga dilakukan oleh Sabinus Beni (2020) tentang efektivitas PKH meringankan kemiskinan di daerah perbatasan yang termasuk dalam daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar). Studi pada Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat bahwa PKH bidang pendidikan telah menurunkan angka putus sekolah bagi anak-anak penerima manfaat PKH serta tingkat kehadiran anak-anak sekolah semakin meningkat ditinjau dari presensi mereka sesuai tujuan awal pelaksanaan program PKH. Studi efektivitas pelaksanaan PKH bidang pendidikan oleh Nurwan dan Hasan (2020) tentang keberhasilan PKH yang ditinjau dari partisipasi KPM dan keterampilan pendamping PKH di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Penelitian yang mereka lakukan mengungkap bahwa partisipasi KPM dan keterampilan dari pendamping memiliki pengaruh bagi keberhasilan pelaksanaan program PKH di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dalam bidang pendidikan bantuan PKH dinilai efektif dalam meringankan pendidikan anak. Dana PKH yang di dapat oleh KPM digunakan untuk membayar iuran sekolah, membeli buku paket pelajaran serta perlengkapan penunjang sekolah lainnya seperti seragam, tas, sepatu, dan alat tulis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2018) tentang

prestasi akademik anak KPM PKH di Sepauk, Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa anak yang mendapat bantuan PKH bidang pendidikan PKH memiliki prestasi yang mumpuni pada tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan bukan faktor yang menjadi hambatan untuk anak KPM PKH dapat berprestasi.

Hasil penelitian di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa PKH bidang pendidikan menunjukkan hasil yang baik dalam membantu Keluarga Penerima Manfaat untuk melaksanakan kewajiban belajar 12 tahun. Masuknya pendidikan anak ke dalam salah satu instrumen PKH merupakan bentuk upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sehingga kualitas masyarakat dapat meningkat dan bentuk negara mampu memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat (Rosevelt et al, 2022). Jaminan pendidikan mendorong maksimalnya persiapan sumber daya manusia di Indonesia untuk menghadapi perubahan industri 4.0 dan society 5.0. Pendidikan dan skill menjadi kebutuhan wajib yang harus dipenuhi dalam menghadapi perubahan metode kerja dan sosialisasi yang sangat bergantung dengan internet. Apabila pendidikan tidak dipersiapkan maka SDM di Indonesia akan tertinggal kemajuan negara-negara luar.

Hambatan atau Kendala Pelaksanaan PKH

Pelaksanaan PKH khususnya bidang pendidikan tentunya tidak bisa berjalan secara lancar tanpa adanya kendala ataupun hambatan di lapangan. Banyak faktor yang menjadi penyebab dari kendala yang muncul. Hal pertama adalah keakuratan data penerima manfaat KPM PKH. Masih banyak dijumpai masyarakat yang mengeluhkan tentang bantuan PKH yang belum tepat sasaran. Seakan terdapat

missing link antara data dari pengurus di daerah dengan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Di era 4.0 permasalahan kesalahan data seharusnya sudah dapat teratasi dengan perubahan akses secara daring yang dapat dilaksanakan secara terkini dan segera.

Pemerataan fasilitas pendidikan dan pembangunan sosial yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia. Seperti diketahui bahwa kondisi pembangunan belum sepenuhnya merata di Indonesia. Dalam hal sumber daya manusia Pulau Jawa masih menjadi daerah yang memiliki kemajuan terdepan dengan adanya pusat pemerintahan, ekonomi, hingga pendidikan tinggi yang ternama masih terpusat di Pulau Jawa. Dalam pelaksanaan PKH juga masih dijumpai masyarakat yang belum mampu untuk mandiri meskipun sudah mendapat program PKH. Dalam bidang pendidikan terkadang masyarakat masih dihadapkan dengan konstruksi sosial yang menganggap bahwa pendidikan adalah kebutuhan sekunder. Sehingga tidak wajib untuk diikuti, atau dalam beberapa kasus penelitian ditemui anak KPM PKH yang justru keluar dari sekolah untuk membantu orang tua atau faktor lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan PKH dalam bidang pendidikan sudah efektif dalam meningkatkan partisipasi anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Hal dilihat dari keberhasilan PKH dalam meningkatkan partisipasi dan bahkan prestasi dari anak-anak dari golongan Rumah Tangga Sangat Miskin di berbagai wilayah di Indonesia. Pendidikan yang mumpuni akan mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga diharapkan anak-anak KPM yang saat ini

menerima bantuan pendidikan kelak akan mampu merubah pola pikir dan kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Serta dapat menghasilkan keluarga yang terjamin keberfungsian dan kesejahteraan sosialnya.

Program PKH dalam bidang pendidikan sangat membantu dalam meringankan beban pendidikan pada keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sehingga pendapatan keluarga dapat di optimalkan untuk mengcover keperluan keluarga lainnya. Meskipun dalam pelaksanaannya PKH bidang pendidikan juga mengalami banyak kendala terutama dalam hal belum meratanya pembangunan yang terjadi. Sehingga terjadi ketimpangan dalam pembelajaran dan penyerapan kemampuan anak KPM PKH di daerah terutama daerah 3T.

Saran

Pemerintah dapat melakukan optimalisasi penyelarasan data antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hal ini untuk menciptakan sistem satu pintu sehingga akses terhadap keterbukaan informasi semakin luas dan menghindari konflik sosial dari pemberian bantuan PKH.

Pembangunan dalam saran prasarana pendidikan harus lebih merata dengan didukung dengan SDM pengajar dan stakeholder yang terlibat untuk dapat kompeten dibidangnya. Sehingga anak KPM di berbagai daerah mendapat ilmu dan kemampuan yang setara sehingga pembangunan sumber daya manusia di Indonesia dapat berjalan merata.

PKH dapat diintegrasikan dengan instansi dan program pemerintah lainnya yang terkait dengan bentuk jaminan dan perlindungan sosial. Seperti dalam integrasi

dengan BPJS sehingga beban kesehatan masyarakat RTSM dapat tercover seluruhnya tanpa membedakan kelas kesehatan. Atau dalam hal jaminan pendidikan tinggi dapat terintegrasi dengan program KIP Kuliah sehingga anak KPM dapat melanjutkan pendidikan tinggi alaupun dengan keterbatasan biaya yang mungkin selama melanda keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, N. P. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PPKH) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN (Studi di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis). 133-140. [oai:jurnal.unigal.ac.id/article/1214](http://oai.jurnal.unigal.ac.id/article/1214)
- Bakulu, B., Pangkey, M., & Kolondam, H. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEKTOR PENDIDIKAN DI DESA HATETABAKO KECAMATAN WASILE TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR. *JAP*, 7 No 101, 18-28.
- Cahyono, S. A. T., & Iryani, S. W. (2019). Gerak Langkah Program Keluarga Harapan:Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17 No 4. <https://doi.org/10.31105/jpks.v17i4.1608>
- Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. California : SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hZ6kBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Basics+of+qualitative+research:+Grounded+theory+procedures+and+techniques&ots=6jKbOtiDY5&sig=y9caUMfgrJTYrk5WTCN98aNBld0&redir_esc=y#v=onepage&q=literature&f=false
- Ghufron, M.A. (2018). REVOLUSI INDUSTRI 4.0: TANTANGAN, PELUANG DAN SOLUSI BAGI DUNIA PENDIDIKAN. *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Hendarsyah, D. (2019). E-COMMERCE ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8 No. 2, 171-184.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (n.d.). PKH | Program Keluarga Harapan. PKH | Program Keluarga Harapan. Retrieved April 9, 2022, from <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>
- Kustanto, M. (2019, 10 22). KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENDIDIKAN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN SIDOARJO. *SOSIO KONSEPSIA*, 8 No 3, 267-286. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i3.1675>
- Kusumaningrum, R., Nugroho, F., & Alrojems. (2020). Faktor-Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi dari Program Keluarga Harapan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19 No 3, 265-275. <https://doi.org/10.31105/jpks.v19i3.2178>
- Nastiti, F. E., & Abdu, A. R. (2020). Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi era society 5.0. *Edcomtech*, 5 No 1, 61-66.
- Nurwani, T. W., & Hasani, H. (2020). Keberhasilan PKHDitinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM:

- Studi Di Sijunjung Sumatera Barat.
Sosio Konsepsia, 10 No. 1, 1-13.
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/2035DOI>
10.33007/ska.v10i1.20351
- Rosevelt, A., Isyandi, B., & Kornita, S. E. (2022). Analisis Prestasi Pendidikan Anak Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Niara*, 14 No 3, 197-212.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA BATU. *Journal of Public Sector Innovation*, 3, 68-74.
- Suparno. (2018). ANALISIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR ANAK DI KECAMATAN SEPAUK. *Jurnal PEKAN*, 3 No 2, 177-185.
- Zavakou, A. (2011). An Evaluation of the CCT Program Familias en Acción on Grade Failure and School Dropout Rates. 1-68. Web.http://www.vsfscz/prilohy/konference/3_sc_f_1_zavakou.Pdf